

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Fakta di Indonesia

Arliansyah^{1*}, Fuadi², Wardhiah³, Husni Pasarela⁴, Reza Juanda⁵

^{1,2,3,5} Universitas Malikussaleh, Aceh, ⁴IAIN Takengon, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 09, 2024

Revised July 15, 2024

Accepted July 25, 2024

Available online 2 August, 2024

Kata Kunci:

Kebijakan, Strategi, Pengentasan Kemiskinan

Keywords:

Policy, Strategy, Poverty Alleviation



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun sudah melakukan berbagai program dan berbagai kebijakan, namun kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai acuan dari penelitian sebelumnya. Sedangkan data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah. Diskusi dan analisisnya melibatkan konsep kemiskinan, dimensi kemiskinan, dan indikator kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan yang lebih baik tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

ABSTRACT

This study aims to analyze policies in poverty alleviation in Indonesia. The background of this study covers various aspects of policies implemented by the government in overcoming poverty. Although various programs and policies have been implemented, poverty in Indonesia is still a serious problem. This study uses a qualitative approach by collecting primary and secondary data. Secondary data is used as a reference from previous studies. While primary data is obtained through observations of government poverty alleviation policies. The discussion and analysis involve the concept of poverty, dimensions of poverty, and indicators of poverty. The results of this study are expected to provide a better understanding and insight into poverty alleviation policies in Indonesia and provide input for improving more effective policies.

PENDAHULUAN

Kebijakan pada dasarnya adalah sesuatu yang ditunjukkan untuk kepentingan publik, secara luas, baik untuk negara, masyarakat, dan berbagai status dan kepentingan lainnya. Dimana kebijakan publik mencakup berbagai aspek, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Ali&Alam, 2012). Ada berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya ditandai dengan upaya pemerintah dalam menerbitkan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang undangan dan merumuskan program kemiskinan (Setiono, 2014). Baik pada masa orde lama maupun pada masa pemerintahan joko widodo dan jufuf kalla, pemerintah berupaya terus menerus agar mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Kebijakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting. Namun pada kenyataannya program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan belum efektif dalam menangani akar permasalahan kemiskinan (Fitrawaty, 2014). Meskipun banyak kebijakan yang telah dilakukan sebagai solusi, seperti program BLT, penghapusan subsidi minyak tanah, konversi bahan bakar gas, infrastruktur, air bersih, dan program jaminan kesehatan masyarakat, namun program tersebut tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia (Liwia, 2018).

Sementara itu suripto menyatakan, pemerintah perlu mengambil kebijakan pengentasan kemiskinan dengan cara melakukan pembangunan yang mencakup program redistribusi pendapatan. Yaitu menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian serta alokasi sumber daya

*Corresponding author

E-mail addresses: arliansyah@unimal.ac.id

yang memadai untuk kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi permasalahan di setiap wilayah dan penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Suripto, 2005). Kemiskinan adalah permasalahan umum yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan persentase penduduk miskin mencapai 9,57 % dengan jumlah 26,36 juta jiwa dan ditetapkan pada urutan ke 73 sebagai negara termiskin di dunia (BPS,2023). Kemiskinan merupakan permasalahan yang besar, yang membutuhkan penanganan yang serius, karena kemiskinan bukan hanya permasalahan individu, golongan atau pemerintah saja, tetapi merupakan permasalahan yang menyeluruh (Herlina & Komariah, 2017).

Menurut Maipita kemiskinan merupakan ketidak sanggupan seseorang untuk mendapatkan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah sebagai tempat tinggal, yang didukung oleh pakaian, makanan dan kebutuhan mendasar lainnya seperti obat-obatan (Maipita, 2014). Sedangkan Bapenas juga memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana sekelompok ataupun perorangan yang terdiri dari laki-laki atau perempuan yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar untuk mendapatkan dan mengikat kehidupan yang bermartabat. Dimana hak-hak tersebut mencakup: memenuhi kebutuhan pangan sandang dan papan, memiliki rasa aman dari tindak kekerasan dan akses untuk ikut serta pada kehidupan sosial dan politik (Bappenas,2021).

Kemiskinan secara umum dapat terjadi karena berbagai hal. Todaro & Smith menyatakan sebuah penyebab terjadinya kemiskinan merupakan karena masyarakat yang tidak mampu mengoptimalkan fungsi serta manfaat dari suatu komoditi bukan karena tidak memiliki komoditi, hanya saja mereka memiliki banyak peluang komoditi yang ada, namun masyarakat tidak mampu menjalankan fungsi dan manfaatnya (Todaro & Smith,2015). Kemiskinan terjadi karena faktor modal manusia yang terlalu dibawah seperti pendidikan dan kemampuan dalam membangun serta rendahnya modal fisik (Dowling & Valenzuela,2010).

Di Indonesia, kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor khusus. Penyebab kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah keterbatasan SDM, terbatasnya modal, dan terbatasnya lapangan kerja serta pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat malas berkerja, dan anggota keluarga yang menjadi beban (Itang,2015). Dan dalam penelitian lainya juga menyebutkan bahwa variabel sebuah konsumsi, inflasi, dan tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat IPM (indeks pembangunan manusia) secara menyeluruh memberikan pengaruh yang sangat besar pada tingkat kemiskinan di Indonesia (Pratama, 2014). Tisniwati dalam penelitiannya menyatakan bahwa yang menjadi peran penting dalam tingkat kemiskinan salah satunya adalah angka harapan hidup, dimana setiap terjadi 1% penurunan angka harapan hidup maka akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan sebesar 6,9% (Tisniwati,2012).

Pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program, Remi & Tjiptoherianjo menyatakan bahwa suatu program penanggulangan kemiskinan yang berhasil tergantung pada target atau daerah sasarannya, seperti siapa dan dimana dia tinggal (Remi & Tjiptoherianjo,2002). Hal tersebut sejalan dengan Smith & Thodaro yang menyatakan bahwa pelunya suatu pengetahuan tentang cara mengetahui siapasaja yang bisa dinyatakan golongan miskin dan bagaimana karakteristik ekonomi yang mereka miliki sebelum merumuskan mereka pada sebuah kebijakan pada program yang efektif untuk menuntaskan kemiskinan (Smith & Thodaro, 2015).

Bappenas menyatakan bahwa program penanggulangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, pertama yaitu sebuah kelompok yang meliputi program-program yang khusus bertujuan untuk kaum miskin, contohnya seperti bantuan yang diberikan berupa beras pada masyarakat miskin, bantuan langsung tunai dan jaminan kesehatan yang diberikan (Priseptian, 2022). Sedangkan pada kelompok kedua semua dari golongan masyarakat berhak menerimanya, bukan hanya masyarakat miskin saja, adapun contoh dari program ini seperti pengurangan pada biaya sekolah, penyediaan obat generic dan pemberian dana pada pelayanan kesehatan (Bappenas, 2007). Segala upaya yang telah dilakukan pemerintah guna untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu: *pertama*, ekonomi yang semakin tumbuh dan berkelanjutan, *kedua*, memiliki pemerintahan yang baik, dan yang *ketiga* yaitu pembangunan sosial. Hal yang dapat dilakukan untuk melakukan strategi tersebut dengan memberi dukungan melalui investasi yang dilakukan pemerintah secara terarah sesuai dengan tujuan (Tambunan,2001). Dalam pelaksanaannya pemerintah diberikan kewenangan dalam berinovasi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metode kualitatif dalam pengambilan datanya. Data yang diambil bersumber dari data sekunder dan primer. Dimana data sekunder yaitu sebuah data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan sudah di kumpulkan terlebih dahulu oleh pihak lain dalam penelitian sebelumnya. Data sekunder yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang dihasilkan dari berbagai media. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan

terhadap fakta tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan observasi (pengamatan).

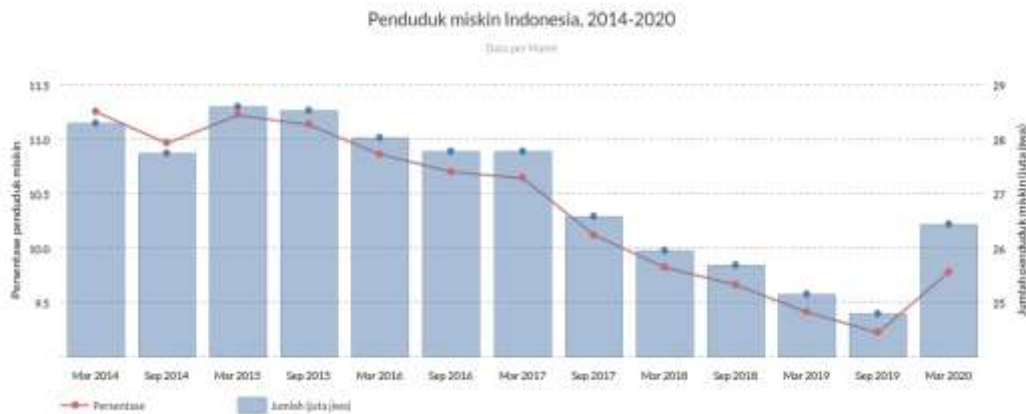
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah penelitian kualitatif sangat diperlukan teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan observasi (pengamatan).

1. Diskusi dan Analisis Kebijakan Pengentasan kemiskinan di Indonesia Kemiskinan

Miskin dapat diartikan sebagai individu atau sekelompok orang-orang yang tidak mampu memberi pendapatan yang cukup untuk dirinya sendiri, dimana hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk terhadap kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang lingkup yang meliputi pasar dan dunia usaha (Jordan,1996). Kemiskinan merupakan segala faktor keterbatasan yang dialami seseorang tanpa diinginkan orang tersebut. Dimana seseorang dinyatakan miskin karna rendahnya akses pendidikan, produktivitas kerja, kesejahteraan dan kesehatan, pendapatan. Dimana hal tersebut dapat memberikan petunjuk pada orang lain bahwa mereka memiliki ketidak berdayaan (Supriatna,1997). Chambers dalam penelitiannya mengemukakan terdapat 5 (lima) dimensi kemiskinan, yaitu: Konsep kemiskinan, konsep ketidak mampuan, kerentanan dalam mengatasi sebuah situasi darurat, tidak dapat lepas dari ketergantungan, dan yang terakhir adalah diasingkan secara geografis maupun sosiologis (Chambers & Robert, 1997). Anggota PBB menerima laporan dari bank dunia yang menyatakan "Dalam pembangunan manusia bukan hanya berfokus dari segi aspek ekonomi, namun aspek pendidikan yang harus diutamakan yang dapat dijadikan tujuan kepentingan bagi orang miskin untuk mengangkat taraf kehidupan sosial dan ekonominya (Bank Dunia,1990).

Kemiskinan secara konsepnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolute (cara pandang kemiskinan dalam satu bentuk ukuran yang bersifat tidak dapat diubah atau tidak dapat diganggu gugat yang berupa dalam bentuk ukuran garis, titik yang menunjukkan batas dari kemiskinan tersebut) dan kemiskinan yang relatif (kemiskinan yang dilihat dari satu bentuk ukuran yang dapat diberikan pengaruh oleh bentuk lainnya yang memiliki keterkaitan dengan proporsi atau distribusi (Nugroho & Dahuri, 2012). Seseorang yang hidup dalam sebuah keluarga ataupun hidup sendiri dapat dinyatakan masyarakat miskin jika akses dan pendapatan yang mereka miliki relatif lemah dan rendah dibandingkan orang pada dasarnya, selain itu cara mengetahui orang yang benar-benar miskin dapat dilihat dari standar gaya hidupnya (Van Den Berg, 2005).Di Indonesia kemiskinan merupakan suatu permasalahan umum yang sering ditemukan hampir di setiap daerah. Kemiskinan tersebut akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun tergantung kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganannya.



(Sumber: BPS 2023)

Seperti dari kurun waktu 2014-2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia memiliki perubahan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang (11,25%), dan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun seperti pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 25,14 juta orang (9,66%). Dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali meningkat menjadi 27,55 juta orang (12,6%), (BPS,2014-2015). Perubahan-perubahan tersebut terjadi karna berbagai hal, seperti upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya penambahan kesempatan kerja bagi pengangguran tersebut (Priseptian & Primandhana, 2022).

2. Indikator dan Penyebab kemiskinan

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS,2016), terdapat tiga indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:

- a. Persentase masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
- b. Indeks kedalaaman kemiskinan digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan.
- c. Indeks keparahan kemiskinan yang dapat memberikan informasi tentang sebaran pengeluaran penduduk miskin

Menurut (Sharp,1996) dalam Kuncoro, kemiskinan dapat disebabkan oleh tiga faktor utama dalam konteks ekonomi, yaitu:

- a. Secara individu, kemiskinan timbul akibat ketidak seimbangan dalam kepemilikan sumber daya yang menghasilkan ketimpangan pendapatan.
- b. Kemiskinan terjadi karna adanya perbedaan dari segi kualitas sumber daya manusia.
- c. Ketidakesetaraan akses terhadap modal juga menjadi penyebab kemiskinan.

Menurut Ginandjar, (1996 juga menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain: tingkat pendidikan yang rendah, angka kesehatan yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan situasi keterisoliran. Sedangkan Menurut laporan (Bank Dunia,2021) , ada lima faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses ke layanan kesehatan dasar dan infrastruktur, serta lokasi geografis. Seperti berikut ini:

- a. kemiskinan sering dikaitkan dengan kesulitan meraih pendidikan tinggi, terkait dengan biaya pendidikan yang mahal. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), biaya lain seperti buku dan seragam sekolah masih cukup tinggi harus dikeluarkan.
- b. Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan suatu jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia, kemiskinan sering terkait dengan sektor pertanian di daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Sebuah studi menemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan di Indonesia, sementara sektor jasa dan industri memiliki dampak yang lebih rendah (Suryahadi, Suryadarma, dan Sumarto,2006).
- c. Gender juga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Di Indonesia, indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, tingkat pengangguran, dan pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.
- d. Kemiskinan juga berhubungan dengan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Sistem infrastruktur yang baik dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan pendapatan orang miskin melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi,dan lainnya.
- e. Lokasi geografis juga berperan dalam kemiskinan. Faktor ini terkait dengan kondisi alam yang mempengaruhi potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Selain itu, pembangunan yang tidak merata antara desa dan kota serta antar provinsi di Indonesia juga memengaruhi kemiskinan.

3. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Sesuai dengan diktorat kantor kepresidenan, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai era kepemimpinan presiden, seperti:

a. Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1967)

Kebijakan yang dilakukan oleh presiden soekarno pada masa jabatannya dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan orientasi pembangunan orde lama guna membangun masyarakat yang adil dan merata, yang dilakukan dengan cara mereformasi lahan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede), (Timbuan, 2021)

b. Masa Kepemimpinan Soeharto (1968-1988)

Pada masa kepresidenan di pimpin oleh soeharto, kebijakan yang ditetapkan untuk mengentasan kemiskinan diantaranya keluarnya instruksi presiden desa tertinggal, program bantuan kesejahteraan masyarakat tidak mampu, program keluarga muda mandiri, hinggga program transmigrasi dan memfokuskan pada program rencana pembangunan lima tahun (REPLITA), (PSKK UGM, 2018)

c. Masa Kepemimpinan BJ. Habibie (1998-1999)

Pada masa BJ Habibie, pemerintah telah memberlakukan sebuah program, dimana program tersebut adalah program jaringan penyelamat sosial (JPS), dan diadakanya beras subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu, pemberian dana pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan beasiswa dalam program padat karya bagi mahasiswa kurang mampu, (Multifiah,2011).

d. Masa Kepemimpinan Gusdur (2000-2001)

Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gusdur, pemerintah telah memberlakukan adanya layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga harga BBM yang diberikan Kompensasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bagi pelayanan menggunakan angkutan umum (Muchafidzin,2013).

e. Masa Kepemimpinan Megawati (2001-2004)

Pada masa megawati pemberantasan kemiskinan dilalui dengan program listrik murah untuk rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga memperluas subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan berada digaris kemiskinan, subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan juga diberikan subsidi pupuk untuk pengembangan pertanian dan subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat (Fianaka, 2018).

f. Masa Kepemimpinan SBY (2004-2014)

Pada masa ini telah dibentuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Harapan (PKH), Raskin/Subsidi beras bagi masyarakat miskin, bantuan siswa miskin (BSM), sampai dengan diluncurkannya program langsung tunai (BLT), maupun program bantuan sementara bagi masyarakat (BLSM), (Anggoro,2008).

g. Masa Kepemilikan Joko Widodo (2014-Sekarang)

Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo sebagai presiden ke tujuh di indonesia telah dilakukannya upaya meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan yang terlebih dahulu, dan juga di kembangkan dengan mengadakan program indonesia pintar (PIP), program indonesia sehat (PIS), Pengembangan program keluarga harapan (PKH), ba tuan yang diberikan berupa beras sejahtera dan bantuan sosial pangan lainnya bagi masyarakat miskin, Bantuan non tunai, dana desa, dan program reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS), (Murdiyana, 2017).

Dari berbagai kebijakan program pengentasan kemiskinan dari masa ke masa tersebut, masing-masing kebijakan yang dilakukan pemerintah diketahui berhasil atau tidaknya dilihat dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menekankan angka kemiskinan. Dan harus disesuaikan dengan masanya (Multifiah,2011). Dengan dilakukannya berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, namun pada kenyataannya kemiskinan di indonesia masih menjadi masalah terbesar bagi penduduknya. Pada tahun 2022, indonesia masih menduduki peringkat ke 73 sebagai negara termiskin di dunia dari 100 negara lainnya (Bank Dunia,2020). Tidak banyak perubahan terjadi dari tahun ke tahun, indonesia adalah negara yang selalu masuk kedalam kategori 100 negara termiskin di dunia. Hal ini terjadi karna berbagai program yang dilakukan untuk menentaskan kemiskinan di indonesia hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kemiskinan, dan kemiskinan akan tetap tinggi (Trimo Yulianto, 2015).

Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya tahap assesment, yaitu perumusan tujuan dan strategi, dan ikut melibatkan peran masyarakat dalam perancangan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lainnya (Nazara, 2007). Tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian masyarakat, serta diperlukanya hubungan yang sinergis dan terpadu antara pemerintah dan lembaga sosial masyarakat (LSM) dalam menjalankan program penyiapan dan pendampingan masyarakat (Suhasil, 2007). Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut di masa depan, ruang lingkup kemiskinan di kecilkan tidak hanya melalui berbagai program-program kebijakan pengentasan kemiskinan, namun untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut agar menjadi lebih rendah perlu adanya strategi kebijakan yang lebih baik. Ada empat pendekatan utama yang digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional, regional dan lokal. Pertama, perlunya upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dengan upah yang layak. Kedua, meningkatkan aksebelitas terhadap barang dan layanan sosial yang merupakan langkah yang penting. Ketiga, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana menjadi faktor penting. Keempat, penyediaan jaringan pengaman sosial yang kuat dan efektif juga menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam mengatasi kemiskinan tingkat nasional, regional atau lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tetap menjadi permasalahan serius di indonesia meskipun telah dilakukan berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Namun kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan di indonesia cukup baik. Hal itu terbukti dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang kemudian program-program pengentasan kemiskinan yang dirumuskan. Dimulai dari masa kepemimpinan presiden pertama yaitu soekarno hingga masa kepemimpinan presiden joko widodo.Pemerintah akan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dari masa kemasa dengan cara menyempurnakan program-program pada masa ke presidenan sebelumnya atau dengan menciptakan program baru sesuai dengan masanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang (11,25%), dan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun seperti pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di indonesia menurun menjadi 25,14 juta orang (9,66%). Dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di indonesia kembali meningkat menjadi 27,55 juta orang (12,6%),

(BPS,2014-2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah memiliki perubahan yang signifikan, namun belum mampu keluar dari garis kemiskinan sepenuhnya.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan merumuskan program kemiskinan, upaya-upaya tersebut belum efektif dalam menangani akar permasalahan kemiskinan. Program-program seperti bantuan sosial, penghapusan subsidi minyak tanah, konversi bahan bakar gas, infrastruktur, air bersih, dan jaminan kesehatan masyarakat belum memberikan jaminan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya modal dan lapangan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor tersebut perlu ditangani melalui pembangunan yang mencakup program redistribusi pendapatan, keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, serta identifikasi permasalahan dan penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan memerlukan program yang tepat sasaran dan memperhatikan karakteristik ekonomi masyarakat yang menjadi target. Program-program penanggulangan kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu program khusus untuk kaum miskin dan program yang berlaku untuk semua golongan masyarakat. Pentingnya ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, pemerintah yang baik serta pembangunan sosial juga menjadi faktor penunjang dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam mengatasi kemiskinan, perlu dilakukan investasi yang terarahsesuai dengan tujuan, dan pemerintah perlu berinovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kemiskinan memiliki berbagai dimensi, seperti konsep kemiskinan, konsep ketidak mampuan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolute dan relatif, dan seseorang dapat dikatakan miskin jika akses pendapatannya lemah jika dibandingkan dengan standar yang ada.

REFERENSI

- Asep Suryahadi, Athia Yumna, Umbu Reku Raya, Deswanto Marbun. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*. Jakarta.
- Ayu Setyo Rini, Lilik Sugiharti. (2016). *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga*. (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan). 1(2), 17-33
- Asep Suryahadi, Gracia Hadiwidjaja. (2011). *The Role of Agriculture in Poverty Reduction in Indonesia*. (SMERU Research Institute, Jakarta). Hal.1-25
- Benny Agus Setiono. (2014). *Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kemiskinan*. (Jurnal Aplikasi Kepelayaran dan Kepelabuhan). Vol.5, No.1, Hlm.49-73
- BRS (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*. No. 07/01/Th.XXVI
- Choiriyah. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ilir Timur*. (Islamic Banking), Vol.3, No.2, Hlm. 17-30
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Beragam Upaya Mengurai Permasalahan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia*. Diakses pada 6 juni 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beragam-upaya-mengurai-permasalahan-pengentasan-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Pemerintah Lakukan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem*. Surabaya
- Laga Priseptian, Wiwin Priana Primandhana. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan*. 24 (1), 45-53. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Mohamad Ikhsan Modjo. (2017). *Poverty Reduction in Indonesia: A Brief Institutional History*. (The Indonesian Journal of Dev.Planning). Vol.1, No.3, Hlm.170-194
- Murdiyana, Mulyana. (2017). *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. (Jurnal Politik dan Pemerintahan). Vol.10, No.1, Hlm.73-96
- Multifiah. (2011). *Critical Review of Poverty Reduction Policies in the Constitutional Review*. (Jurnal of Indonesian Applied Economics). Vol.5, No.1, Hlm.1-27
- Muhammad Adryan Okuputra, Nasikh. (2022). *Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan*. (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen). 18 (1), 159-166
- Nyoman Sudipa, Putu Suda Nurjani. (2021). *Strategy for Accelerating Poverty Reduction in Klungkung Regency, Bali*. (Journal of Home Affairs Governance). 13 (1), 41-51, <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.41-51>

- Samson Laurens, Aditya Halim Perdana Kusuma Putra. (2020). *Poverty Alleviation Efforts through MDG's and Economic Resources in Indonesia*. (Journal of asian Finance, Economics and Bussines). Vol.7, No.9, Hlm.755-767
- Slamet Priyo Marmujiono. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Tahun 2009-2011*. (Economics Development Analysis Journal). 3(1).159-172.
- Sovia Dewi, M.Shabri, Abd.Majid, Aliasuddin, Salina Kassim. (2018). *Dynamics of Financial Development, Economic Growth, and Poverty Alleviation: the Indonesian Experience*. (Shout East Journal of Economics and Bussines). Vol.13, (1), 17-30
- Timbuan. (2021). *Dynmics of Government Policy Implementation in Proverty Reduction in Indonesia*. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara). Vol.19, No.3, Hlm. 228-238
- Trimo Yulianto. (2021). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Diaksespada 5 juni 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id>
- Vellayati Hajad, Ikhsan, Herizal, Ikhwan Rahmatika Latif, Nodi Marefanda. (2022). *Poverty and the Curse of Natural Resources in Indonesia*. (Journal of Contemporary Governanceand Public Policy). 4 (1), 41-58. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.92>
- Willya Achmad, Nunung Nurwati, Muhammad Ferdiansyah, R. Widya Setiabudi Sumadinata. (2022). *Implementing Social Capital in Proverty Reduction Efforts in Indonesia*. (Baltic Journal of Law & Politics). Vol.15, No.3, Hal.690-697